

KONTRIBUSI WAKAF TANAH MILIK SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMAT

(Studi Kasus Di Desa Menemeng)

Oleh: Kamarullah, M. H.I & Ratnawati, M. Ag.

e-mail:kamrullah01@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah :1).Untuk mengetahui pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif ditinjau menurut syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, 2). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di Desa Menemeng, 3).Untuk mengetahui penyebab perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan oleh umat Islam di Desa Menemeng. Metode yang digunakan adalah metode non *doktrinal*, jenis penelitian *diagnostik* dan bersifat *kualitatif*. Teknik pengumpulan data: wawancara dan kepustakaan. Jenis data yakni data primer (responden) dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan interpretasi teori (*theoretical interpretation*).Kesimpulan penelitian ini adalah; 1) Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usahaproduktif dalam syariat Islam adalah masalah *ijtihad*, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam PeraturanPemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres nomor 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan *shodaqoh*,Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,tujuanwakaf untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam, 2) Wakaftanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadappeningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal, 3) Perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan di Desa Menemeng dikarenakan: a) Struktur hukum; 1,Kepala Kantor Urusan Agama belum menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, pengawas, pelaksana perwakafan secara maksimal, khususnya di bidang pembimbingan,2. Belum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kabupaten b)Budaya hukum umat Islam di Desa Menemeng masih berorientasi pada pola pikir konvensional.Wakaf dipahami sebagaimana yang ada dalam pengertian agama secara klasik Di sampingkurang maksimalnya sosialisasi undang-undang perwakafan kepada masyarakat ditingkat pedesaan.

Kata Kunci: *Wakaf Tanah, Ekonomi Ummat.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, masih menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan social yang hingga saat ini belum terpecahkan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah, sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini. Usaha-usaha secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan belum dapat dirasakan hasilnya oleh puluhan juta kaum *lemah/dhuafa* yang tersebar di seluruh tanah air, hal ini sangat berlawanan dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan sosial.¹

Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa bertambahnya jumlah penduduk yang berkehidupan di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*) akan tetapi lain persoalan distribusi yang kurang merata serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan structural sehingga upaya untuk mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan konprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis dan sesaat.² Untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan materiil maupun spiritual hanya mungkin dapat dicapai beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu tercapainya hak-hak azasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan.³

¹ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 2006*, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hal. 1-2

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Di dalam ajaran Islam keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor-faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi, keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.⁴

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan penghidupan beragama dan bermasyarakat dan semakin luas dan kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan sprituil menuju masyarakat adil dan makmur.⁵

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia tahun 2003*, Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, hal. 1.

⁶ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2006, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 1.

Obyek perwakafan di Indonesia umumnya masih berupa tanah, sehingga Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, dalam Pasal 49 ayat (3) mengatur bahwa : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁷

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam soal perwakafan tanah milik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan tanah milik, yang dalam konsideran menyebutkan :

- a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tatacara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah.⁸

⁷ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2006, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 1.

⁸ *Undang-undang Perwakafan*, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta, hal. 80

Pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia diantaranya mengatur tentang wakaf. Peraturan yang ada tersebut dirasa kurang memadai karena permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat dan dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai *nazhir* dari waktu ke waktu yang berkembang. Di samping itu masyarakat amat membutuhkan peraturan mengenai wakaf produktif dan wakaf uang yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi wakaf di negara kita.

Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang antara lain menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum, maka penyusunan rencana Undang-undang (RUU) Wakaf merupakan bagian yang *inheren* dengan penataan sistem hukum nasional, seperti dimaksud dalam GBHN adalah yang bersifat menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Dengan adanya Undang-undang Wakaf, maka pengembangan wakaf memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, antara lain untuk memberikan kepastian hukum kepada *wakif* (pewakaf), *nadhir* (pengelola wakaf), dan *maukuf 'alaih* (yang berhak menerima hasil wakaf).⁹

Jika memperhatikan kenyataan yang ada di wilayah Desa Menemeng yang terdiri dari 12 Dusun, menunjukkan kecenderungan masyarakat di kawasan ini dalam menunaikan wakaf tanah milik dapat dikatakan baik. Dari data yang ada di Desa Menemeng ini menunjukkan wakaf tanah milik tersebar di seluruh Dusun. Setidaknya ada 20 lokasi wakaf tanah milik dengan luas 486. M², meskipun pemanfaatan wakaf tanah milik sebagian besar diperuntukkan tempat ibadah, pendidikan.

⁹ *Undang-undang Perwakafan*, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta, hal. 80

Sedangkan wakaf produktif ada 4 buah, berupa lahan persawahan (sebagaimana tabel II dalam lampiran) dengan luas 18.306 M2. Sebagian besar wakaf produktif ini berada di Dusun Montong Are, Jabon tentan dan Dasan Gundul,.

Dorongan sebagian besar umat Islam di kawasan Desa Menemeng dalam mewakafkan tanah miliknya, cenderung melihat kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan masalah ibadah, utamanya tempat ibadah. Uswatun 14 melihat bahwa wakaf mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, meskipun menilai sebagian besar wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat persoalan wakaf tanah dengan judul KONTRIBUSI WAKAF TANAH MILIK SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMAT DI DESA MENEMENG.

A. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat dari pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem.¹⁰ Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum

¹⁰ Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hal. 30

pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum, yaitu :

- a. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
- b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya.
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.
- d. Mempertahakan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala ada. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.

Dari empat pekerjaan hukum tersebut, menurut Satjipto Rahardjo secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu :

- a. *Social Control* (kontrol sosial)

Social kontrol merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Termasuk dalam lingkup kontrol sosial ini adalah:

- 1) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- 2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat

- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

b. *Sosial Engineering* (rekayasa sosial)

Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. Perubahan perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.¹¹ Robert B. Seidman menyatakan tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undangundang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatankekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksisanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.¹²

Dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dalam pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor, Robert B Seidman mencoba untuk menerapkan pandangannya tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Juhaya S Praya dalam bukunya yang berjudul *Perwakafan di Indonesia*, yang menjelaskan bahwa Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan

¹¹ Satjipto Raharjo, *ibid*, hal. 78

¹² Esmi Warrasih, *Op.Cit*, hal. 81-82

mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi²² Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Selain itu dalam buku *Fiqh Wakaf* yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI menjelaskan tentang Pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan yang berhubungan dengan wakaf. Sejumlah kajian tentang tanah wakaf sebagaimana tersebut diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Al-Qur'an dan Hadits, Buku dan lain-lain.

1. Pengertian Serta Kedudukan Wakaf Dalam Ajaran Islam.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata "*waqafa*" yang berarti "berhenti", maksudnya berhenti jadi obyek dalam lalu lintas perdagangan, tidak boleh dijadikan obyek transaksi hanya manfaatnya yang boleh diambil oleh pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan itu. Kata "*waqafa*" adalah sinonim dengan bahasa yang berarti "*menahan*", maksudnya menahan benda pokoknya tidak boleh dialihkan, yang diambil hanyalah manfaatnya atau hasilnya. Kata lain yang dapat dipakai dengan maksud "*mewakafkan*" adalah "*sabbala*", maksudnya menjadikan benda yang dilepaskan itu "*fi sabilillah*" dipergunakan manfaatnya di jalan Allah.

Adul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 memberikan definisi dari lafal wakaf sebagai berikut : "*wakaf (Al-waqf = menahan tindakan hukum)*. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²³ Muhammad

Rawwas Qal'ahji, mendefinisikan wakaf adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah.¹³

Menurut Muhamad Al-Khathib, kata "*wakaf*" berasal dari bahwa Arab "*waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam ditempat" atau "tetap berdiri". Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan "*habasa-yahbisutahbisan*", sedang kata "*al-waqfu*" dalam bahasa Arab, mengandung beberapa pengertian "*al waqfu bi ma'na at tahbiisi wattasbiili`l*" yang artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.¹⁴

2. Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Wakaf.

1. Dasar Hukum

Secara teks, masalah wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di Al- Qur'an dan Al-Hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Jadi dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas tentang ajaran wakaf. Yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan, demikian pula dalam Al-Hadits/As-Sunnah.

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf Wakaf

¹³ Muhamad Qawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khaththab ra, terjemahan M. Abdul Mujieb AS, dkk, cet. Pertama*, 2005, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 641

¹⁴ *Ibid*

merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat yang mendatangkan kemaslahatan amat besar bagi masyarakat dan umat, serta bagi negara. Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Sepanjang sejarah Islam wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama dan masyarakat Islam yang di Indonesia sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf atau perwakafan sebagai wadah yang merupakan suatu proses secara normatif di dalam Islam, dipahami sebagai lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting, disamping lembaga sosial Islam lainnya seperti zakat, infak, perbankan, dan shadaqah. Sebagai salah satu pilar dan sarana untuk mengembangkan bidang sosial ekonomi guna menunjang dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan umat Islam. Sebagai proses, perwakafan dapat dijadikan suatu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam menjadikan lembaga wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi umat Islam.

Tujuan wakaf, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵ Sedang Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.¹⁶ Lebih tegas lagi yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁰ Secara rinci dikemukakan oleh Sufyan Hasan, bahwa untuk kepentingan peribadatan berarti untuk hal-hal yang langsung berhubungan dengan Tuhan (Allah

¹⁵ Peraturan Perundang-undangan Perwakafan, *Op.Cit*, hal. 129.

¹⁶ *Ibid.*

SWT), secara vertikal, misalnya untuk masjid, mushala dan sarana-sarana peribadatan lainnya. Sedangkan untuk kepentingan umum, berarti untuk kepentingan kemasyarakatan pada umumnya, misalnya untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini yang lebih penting adalah melestarikan tujuan wakaf dengan cara pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh *nazhir* agar manfaatnya dapat kekal dinikmati masyarakat.⁵¹ Bahkan dalam Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, disebutkan bahwa wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.⁵² Pendapat lain mengatakan, bahwa wakaf adalah salah satu amalan ibadah. Oleh karena itu wakaf harus mempunyai tujuan tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Ibadah disini maksudnya adalah ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah yang tidak ditentukan), yakni ibadah yang bersifat sosial, misalnya untuk membangun sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana sosial, sarana olah raga, kesehatan dan lain sebagainya, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Sehingga wakaf dapat mengentaskan kondisi anak yatim, fakir miskin dan lain-lainnya agar menjadi kaya, baik itu keluarganya sendiri maupun bukan keluarganya. Wakaf juga bisa untuk membangun sarana kepentingan umum, misalnya masjid, sekolahan, jembatan, pasar dan lain-lain.¹⁷ Dalam hal masalah fungsi wakaf, maka dapat dipahami dari Pasal 5 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yakni fungsi wakaf untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan

¹⁷ Sadzali Musthofa, 2007, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I, CV. Ramadlani, Solo, hal. 125

potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁸ Dengan demikian jelaslah, bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah disamping untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam (untuk kepentingan ibadah), juga untuk mengekalkan manfaatnya guna mewujudkan potensi ekonomi umat demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

3. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam, yaitu pemerintah terus berupaya agar pengelola wakaf dapat berjalan dengan baik dan memberikan harapan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Langkah yang dilakukannya adalah dikembangkan sistim pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta sesuai garis kebijakan pemerintah. Untuk mencapai arah dan tujuan tersebut perlu diadakan pembaharuan hukum wakaf yang diperlukan di Indonesia. Reformasi hukum wakaf yang dilaksanakan adalah memberikan akses dan kemudahan bagi umat Islam untuk meningkatkan lembaga sosial dan ekonomi Islam dalam tatanan hukum positif dalam bentuk Undang-undang. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan kebebasan dan tempat bagi umat Islam dengan seminimal mungkin terhindar dari perlakuan yang diskriminatif. Guna mewujudkan sistim hukum nasional yang berpijak pada hukum yang hidup didalam masyarakat, maka hukum Islam sebagai bagian sistim hukum nasional harus dijadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional. Problem yang terbesar bidang hukum di Indonesia pada saat sekarang adalah supremasi dan hak

¹⁸ Peraturan Perundangan Perwakafan, *Op.Cit.*, hal. 4 dan 129

asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran secara obyektif masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu yang mempengaruhi adalah belum terciptanya materi hukum yang berpijak pada keyakinan yang tumbuh dan dipelihara oleh masyarakat baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan agama.¹⁹ Lembaga wakaf (berikut pengelolaannya), walaupun secara *qoth'i* tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi setidaknya dalam kenyataan telah menjadi bagian yang diakui eksistensinya di dalam pergaulan hidup umat Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah negara dalam hal ini memberikan tempat lembaga wakaf diatur didalam suatu undang-undang khusus. Berbicara mengenai wakaf dan pengelolaannya di Indonesia, khususnya pengembangan konsep wakaf tunai yang terhitung masih sangat baru, tidak bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. Paling tidak ada tiga periode pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu⁵⁶ :

1. Periode Tradisional

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *madhlah* (pokok), yaitu hampir semua bendabenda wakaf dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan sarana fisik, seperti masjid, mushala, pesantren, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya :

- a. Kebekuan paham terhadap wakaf.
- b. *Nazhir* wakaf yang masih tradisional.
- c. Peraturan perundang-undangan yang belum memadai.

2. Periode Semi-Profesional

Dalam periode ini pengelolaan wakaf sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal

¹⁹ Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, *Dirjen bimas islam dan penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf. Hal. 55-56*

misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan berbagai pertemuan lainnya, contohnya masjid sunda kelapa, masjid pondok Indah, masjid at taqwa pasar minggu dan lain-lain, semua terletak di Jakarta, Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Selain itu mulai dikembangkan pula pemberdayaan tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti tokoh-tokoh, koperasi, usaha bengkel dan sebagainya, yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), seperti yang dilakukan oleh pondok pesantren Modern Assalam Gontor Ponorogo. Untuk pengembangan wakaf dibidang kesehatan misalnya yang dilakukan oleh yayan wakaf Sultan Agung Semarang dan lain sebagainya.

3. Periode Profesional

Pada periode ini daya tarik wakaf mulai diperdayakan secara profesionalproduktif. Keprofesionalannya dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM*Kenazhiran*, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak, namun meliputi benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya. Dalam periode ini isu yang paling menonjol adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh seorang tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof, MA. Mannan kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia sudah dimulai dengan adanya dompet *Dhuafa* Republika.⁵⁷ Pengelolaan wakaf yang baru dan modern , lebih menekankan pada prinsip tanggung jawab dan ketransparanan.²⁰

Pembaharuan di bidang dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia, secara umum telah diarahkan oleh pemerintah kepada :Pembangunan materi hukum aparatur hukum, serta sarana dan prasarana

²⁰ *Waqf Accounting and The Construction of Accountability* ; Hidayatul Ihsan and Muhammad Akhyar Adnan ; Padang State Polytechnic, Indonesia and Kullyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia. Padang, Indonesia, 2009.

hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.²¹

Dengan berlakunya Undang-undang tentang pengelolaan wakaf terjadi perubahan besar dan langkah maju di dalam penataan harta wakaf yang ada di Indonesia. Reformasi hukum yang dilakukan setidaknya mengubah pemikiran sebagai landasan lahirnya Undang-undang wakaf sebagai bagian tata hukum nasional pada akhirnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu sudah barang tentu membawa dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan, terutama bagi umat Islam di Indonesia. Pengaturan wakaf yang pernah berlaku secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

a. Masa Pemerintahan Kolonial

Pengaturan administrasi wakaf (tanah) sebenarnya sudah dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada Tahun 1905, selanjutnya beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam.⁶⁰ Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor, 435, yang termuat dalam Bijblad Nomor. 6195, tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaanshe Bedehuizen*. Surat edaran tersebut berlaku di seluruh Jawa Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Tujuan surat edaran ini untuk mengawasi tanahtanah yang diatasnya didirikan bangunan. Jika sudah tidak dipergunakan sebagai wakaf supaya jangan diterlantarkan dan supaya didaftarkan agar dapat dibatasi, jika kepentingan umum menghendaki. Inti dari surat edaran yang ditujukan kepada para Bupati ini adalah :

²¹ *Ibid*, hal. 56

- 1) Supaya para Bupati mendaftarkan wakaf tanah milik orang yang sudah dilakukan umat Islam.
- 2) Dan jika wakaf baru harus dengan ijin Bupati.⁶¹

Surat Edaran ini tidak berlaku efektif karena tidak dilaksanakan oleh Bupati, bahkan muncul penolakan dari kalangan umat Islam. Selanjutnya berturut-turut muncul beberapa Surat Edaran, yang kesemuanya tidak berlaku efektif pada masa Kolonial Belanda. Dengan munculnya penolakan umat Islam memaksa pemerintah Kolonial Belanda melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat-surat edaran sebelumnya, yang kemudian ternyata surat edaran yang dibuat terakhir (tanggal 27 Mei 1935 Nomor. 1273/A, yang termuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480, tentang *Toeziç van de Regeering Op Mohammadaansche En Wakaps* ini memberikan angin segar bagi umat Islam, karena jika akan mewakafkan tidak perlu lagi minta ijin Bupati tetapi cukup pemberian saja.⁶²

a. Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama), tanggal 3 Januari 1946, maka wakaf mulai menjadi wewenang Departemen Agama. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 yang disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952. Dalam peraturan tersebut disebutkan Departemen Agama dengan lembaga hierarkinya ke bawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khususnya benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Dengan demikian wewenang Departemen Agama terbatas pada hal-hal tersebut. Dan didalamnya tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah negara.⁶³

b. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Pada tahun 1960 Indonesia mempunyai Undang-undang Pokok Agraria, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang diundangkan

pada tanggal 24 September 1960 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomoer 104. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa “Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya :

(b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁴ Dalam rangka penertiban tanah wakaf dan pembaharuan hukum agraria di Indonesia, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat kita cermati ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, sebagai berikut :

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
 - 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
 - 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁵
- c. Masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38.

Adapun yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya adalah :

- a) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka

mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- b) Bahwa peraturan perundang-undangan yang sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.⁶⁶

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.⁶⁷ Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, selanjutnya telah pula dikeluarkan berbagai aturan-aturan lain yang mengikutinya sebagai aturan pelaksanaan, antara lain :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- b) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978.
- c) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).
- d) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/75/1979, tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturanperaturan tentang Perwakafan Tanah Milik.⁶⁸
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, mengukuhkan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diantaranya juga mengatur tentang wakaf. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), erat kaitannya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang memberikan kompetensi lebih luas kepada Pengadilan Agama dan menjadikan kedudukannya sama dengan Pengadilan Negeri, Kompetensi Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya dibidang perkawinan, kemudian diperluas di bidang kewarisan, wakaf, wasiat, dan hibah.⁶⁹ Dilihat dari tujuan pembentukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), diarahkan kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam di Indonesia. Di dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan satu bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Namun demikian pada hakekatnya ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.⁷⁰ Menurut H.M. Tahir Azhary, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu elaborasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, obyek wakaf yang diatur hanya tanah milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, sehingga obyek wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sangat terbatas. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), obyek wakaf meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pula tentang ketentuan yang belum pernah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu tentang pembatasan jumlah *nadzir* sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas jika dibandingkan dengan pengaturan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dan Kompilasi Hukum

Islam lebih bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.⁷¹

- e. Pelaksanaan Perwakafan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf. Dalam ketentuan peralihan Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁷² Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan aturanaturan sebelumnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes. Salah satu perbedaannya antara lain, Undang-undang ini mengatur wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undang ini juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak, contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam Pasal 15 dan 16). Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 31.⁷³

C. Kerangka Berfikir

Skripsi ini dimulai kajian dari perspektif hukum Islam atau pandangan agama, bahwa wakaf adalah kegiatan ibadah. Artinya

munculnya perwakafan ini didorong oleh sifat keberagamaan seseorang dalam melaksanakan perintah agama. Tetapi disisi lain, wakaf juga mempunyai nilai-nilai ekonomi. Wakaf merupakan salah potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya, dan ekonomi umat pada khususnya. Kenyataan tersebut telah direspon oleh negara dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian diikuti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Dengan demikian Undang-undang perwakafan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang : Kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensiekonomi umat di Desa Menemeng. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yang *diagnostik* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala.²² Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignyosoebroto seperti dikembangkan oleh Setiono adalah sebagai berikut :

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu responden. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup atau di dapat dari

²² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984, UI Press, Jakarta, hal. 10

dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan seterusnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang akan diwawancarai

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui landasan teori yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundangundangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

3. data) selanjutnya ditafsirkan / diinterpretasikan menggunakan landasan teori yang telah ditentukan (*theoretical interpretative*), dianalisa dengan menggunakan teknik *induktif*, kemudian analisa terhadap data yang berkaitan dengan seberapa besar manfaat wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat untuk mengangkat keadaan sosial Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden.

1. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.

C. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, digunakan teknik analisis kualitatif yang penyajiannya dalam bentuk *deskriptif* terhadap data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul (hasil wawancara dengan responden) dilakukan reduksi data (pemilahan dan penyederhanaan ekonomi umat akan dilakukan dengan pengolahan, analisa dan konstruksi data secara *kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, dengan pengertian bahwa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, selanjutnya menarik kesimpulan. Dengan kata lain metode *kualitatif* bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang dan kebenaran.²³

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Keadaan Ekonomi

Tabel 1

Proporsi sumber mata pencaharian masyarakat desa Menemeng

NO	JENIS PEKERJAAN	Proposi jumlah angkatan kerja tahun 2010	
		Jumlah	%
(1)	(2)		
1	Petani	1,093	15.00
2	Buruh tanu/buruh bangunan	1,822	25.00
3	Buruh harian lepas	729	10.00
4	Pedagang	510	7.00
5	Wiraswata	365	5.00

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1991, Jakarta, hal. 249-250

6	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	72	1
7	Jasa angkutan	218	3
8	Peternak	655	9
9	Tukang bangunan	728	10
10	Belum bekerja	1,040	18
11	Pengerajin	52	1
Jumlah		7,284	100

Sumber data : BPS kabupaten lombok tengah

Desa menemeng merupakan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani, penerapan tehknologi pada usaha pertanian, dan kerajinan dan sektor skunder mulai berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 2.352 kepala keluarga yang ada, sebanyak 962 KK masih tergolong miskin masih tergolong tidak mampu (sumberdata jamkesmas dan jamkesda) itupun masih banyak epala keluarga yang mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di rumah sakit atau untuk pendidikan anaknya. Dengan hal tersebut menunjukan betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM masyarakatnya masih rendah juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan kerja sangat rendah.

B. Pembahasan

1. Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif menurut syari'at Islam dan perundang-undangan

a. Dalam Syariat Islam

Syari'at Islam tidak merumuskan secara jelas dan rinci tentang perwakafan, hal ini berbeda dengan masalah zakat. Dalam zakat telah ditentukan tentang subyek, obyek dan bahkan tentang teknis operasionalisasi zakat. Wakaf dalam sejarah Islam, dikenal sejak masa Rosululloh SAW karena pensyariatannya sejak nabi berhijrah ke madinah pada tahun 2 Hijriyah, pendapat tentang yang pertama kali melakukan wakaf, yaitu Rasulullah dan Umar bin Khathab²⁴, kemudian Abu halhah menyusulnya dengan mewakafkan kebun kesayangannya (*Bairoha*) dan disusul oleh sahabat-sahabat lainnya. Data sejarah ini menunjukkan masalah perwakafan berada dalam wilayah *ijtihad*, hal tersebut juga dikemukakan para ulama bahwa wakaf digolongkan amal sholeh (*shodaqoh jariyah*) yaitu amal perbuatan yang pahalanya mengalir terus hingga si pewakaf meninggal dunia. Di sini menunjukkan bahwa keabadian harta wakaf harus selalu dijaga agar tidak habis dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif sedangkan kemanfaatan benda wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat.²⁵ Sedangkan yang dimaksud *ijtihad*, yaitu berasal dari bahasa arab, "*jahada*" yang berarti bersungguh-sungguh, dalam arti terminologi hukum ialah usaha yang bersungguh-sungguh, dengan menggunakan segala kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam al-quran dan sunnah Rasulullah²⁶

²⁴ Al-Syaukani : 129, dalam deretorat pemberdayaan wakaf, fikih wakaf, jakarta drektorat jenderal bibingana masyarakat islam

²⁵ HM Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hal 104.

²⁶ Ibid hlm. 107.

Adapun *ijtihad* menurut ulama Ushul ialah usaha seseorang yang ahli fiqh yang menggunakan kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi *ijtihad* adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Dari pengertian *ijtihad* sebagaimana disebut di atas, maka *ijtihad* mengandung dua faktor: Pertama, *ijtihad* yang khusus untuk menetapkan hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian *ijtihad* yang sempurna dan dikhususkan bagi ulama' yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu' amaliyah* dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Kedua, *ijtihad* khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Mereka inilah yang mencari dan menerapkan 'illat terhadap berbagai kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip ulama' terdahulu. Dengan tugas penerapan tersebut maka akan menjadi jelaslah ketentuan hukum-hukum tentang masalah-masalah yang tak dikenal oleh ulama' terdahulu.²⁷ Lembaga *ijtihad* ini digunakan apabila al-Quran dan as-sunnah tidak mengatur secara detail (rinci), dalam bentuk praktisnya hasil *ijtihad* adalah kitab hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (*yurisprudensi*) dan konsensus (*ijmak*) Ulama. Pada proses penerapan hukum Islam ini diperlukan pendekatan, antara lain dengan melalui peraturan perundang-undangan, pengadilan (yudikatif), sosial maupun perilaku.²⁸ Kedudukan *ijtihad* dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan muamalah yang ada dalam al-Quran dan hadis bersifat umum, sedangkan dalam

²⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Syifullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falaahuddin, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003, hal. 567.

²⁸ Gemala dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salman Barlintih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 7-8.

pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat dan hadis hukum yang menjadi obyek *ijtihad* hanyalah yang *dzanni* sifatnya, *ijtihad* dapat juga dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuan yang terdapat dalam al quran dan hadis dan juga mengenai masalah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.²⁹

Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari *ijtihad ulil amri* terbagi dua, yaitu sebagai berikut;

1. Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam al quran, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladanyang diberikan oleh nabi Muhammad, dan
2. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hokum baru bagi keadaan-keadaa baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam alqur an dan sunnah rosul.³⁰

Perwakafan tanah hak milik untuk usaha produktif adalah bagian dari pemikiran syari'at Islam dalam merespon perkembangan zaman. Tanah wakaf dikelola sedemikian rupa yang hasilnya diperuntukkan kepentingan agama dan untuk kesejahteraan masyarakat umum , yaitu hasil dari wakaf tersebut bukan hanya diperuntukkan dan dapat dinikmati oleh segolongan dan kelompok serta agama tertentu saja akan tetapi dapat juga dinikmati oleh semua lapisan masyarakat masyarakat. Wakaf tanah produktif berupa sawah yang digarap untuk lahan pertanian yang diharapkan menghasilkan uang, untuk membiayai kepentingan pendidikan, santunan anak yatim

²⁹ *Loc. Cit*, Moh. Daud Ali hal, 107

³⁰ *Ibid*, hal 105

dan usia lanjut (jompo). Sedangkan wakaf benda tak bergerak lebih banyak diperuntukkan untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, misalnya masjid, mushalla, pondok pesantren dan balai pengobatan.

b. Dalam peraturan Perundang-undangan.

Penelusuran tentang perkembangan wakaf di Indonesia tercatat dalam sejarah ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
2. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan shodaqah.
3. Undang- undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undangundang nomor 41 tahun 2004. tentang Wakaf.

Beberapa Undang-undang tersebut merupakan respon pemerintah terhadap umat Islam yang berupa regulasi, agar perwakafan dapat berjalan baik, dan tidak keluar dari ajaran agama juga diharapkan dapat ikut serta dalam peningkatan perekonomian umat pada umumnya. Peraturan pemerintah no. 28 tahun 1997 pada intinya mengatur danmemberikan legitimasi tentang pendaftaran tanah wakaf. Adanya pendaftaran terhadap wakaf tanah tersebut secara umum memberi legitimasi dan kekuatan hukum bagi tanah wakaf tersebut. Hanya saja pengaturan mengenai wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 masih terbatas wakaf tanah milik .

Ketentuan tentang perwakafan pada Kompilasi Hukum Islam hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, hanya saja ada beberapa perbedaan yaitu dalam Peraturan Pemerinta nomor 28 tahun 1977 obyek wakaf terbatas hanya tanah milik sedangkan dalam Kompilasi

Hukum Islam obyek wakaf meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, perbedaan lain yaitu *nazhir* pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 adalah seseorang atau badan hukum sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam seseorang atau kelompok orang atau badan hukum, selain itu Kompilasi Hukum Islam mengatur pula tentang ketentuan tentang pembatasan jumlah *nazhir* sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas jika dibandingkan dengan pengaturan wakaf. yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997. Dan Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.

Beberapa perundangan-undangan yang menyebutkan tentang wakaf benda bergerak terdapat Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 15 yang berbunyi “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah, dan pasal 16 yang berbunyi “1) harta benda wakaf terdiri dari; a. Benda tidak bergerak, dan b. Benda bergerak. 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; a. Uang, b. Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual, f. Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan

peraturan perundangundangan yang berlaku”. Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31. Sedangkan perundangan lain tidak mencantumkan seperti apa yang disebut dalam pasal-pasal di atas. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 adalah merupakan perluasan benda yang diwakafkan atau *mauquf bih*. Sebelum Undang-undang tentang wakaf ini berlaku, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan konsumtif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, sekolah dan sebagainya. Namun saat ini sedang berkembang dan sudah dipraktekkan oleh sebagian lembaga Islam terhadap wacana wakaf benda bergerak, seperti uang (cash waqf), saham atau surat-surat berharga lainnya seperti yang diatur dalam undang-undang wakaf ini.

Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, dimana terdapat perluasan harta benda wakaf yaitu yang berupa harta yang bergerak adalah merupakan suatu terobosan baru dibidang perwakafan sebagaimana dalam konsiderannya yang disebutkan bahwa terbitnya undang-undang ini menyebutkan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka untuk memelihara kepentingan dan memajukan kesejahteraan, perlu peningkatan peran wakaf disamping sebagai pranata keagamaan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf dapat ditunaikan apabila benda itu menjadi milik sempurna (*almilkuttam*) artinya benda wakaf tersebut secara substansi, benda itu dikuasai ujudnya dan juga dikuasai manfaatnya, misalnya orang memiliki satu bidang tanah. Pemilikan dan pemanfaatan benda

tersebut berada ditangan sipemilik, misalnya sebidang tanah tersebut disewakan, si pemilik tidak menguasai tentang pemanfaatan benda tersebut. Perwakafan tanah semacam ini belum dapat dilaksanakan menurut hukum Islam jika pemanfaatan benda tersebut belum kembali dimiliki si pemilik. Dalam hukum Islam benda ini dapat digolongkan dalam pemilikan secara sempurna.

Benda tak bergerak dan bergerak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 tersebut tidak banyak menimbulkan masalah dalam hukum Islam dalam kajiankajian klasik hukum Islam sudah diketemukan pembahasan masalah tersebut tetapi, harus memenuhi persyaratan dalam perwakafan yaitu sesuai dengan fungsi wakaf yaitu hasil dari benda wakaf dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan umat, sedangkan harta benda wakaf tetap abadi sesuai dengan syariat Islam.

Perwakafan benda bergerak sebagaimana tercantum dalam pasal 16 seperti a. Uang, b. Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual, f. Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal ini dapat dikatakan masalah baru dalam hukum Islam. Pembahasanpembahasan hukum Islam klasik tidak banyak dijumpai masalah ini. Modernisasi dalam dunia ekonomi mendorong hukum Islam merespon hal tersebut. Maka muncullah satu pemikiran yang disebut *ijtihad* dalam hukum Islam. *Ijtihad* dimaksud para ahli hukum Islam dituntut untuk mengembangkan pemikiran agar hukum Islam mampu menyelaraskan dengan modernisasi di bidang ekonomi. Dengan sendirinya hukum Islam menerima perkembangan perwakafan. Seperti wakaf uang, hak intelektual dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam pasal 16 tersebut diatas. Terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menunjukkan sikap *responsif* dari pemerintah terhadap

kepentingan umat Islam di bidang perwakafan. Regulasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *ijtihad*, yakni untuk *kemaslahatan* masyarakat pada umumnya, dan umat Islam khususnya, *kemaslahatan* yang dimaksud adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dari berbagai golongan dan agama untuk mempermudah dalam beribadah kepada Allah. Dengan demikian undang-undang ini memprioritaskan pemberdayaan wakaf secara produktif disamping juga dapat dijadikan payung hukum perkawafan di Indonesia. Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat didambakan. Wakaf itu bukan hanya sebagai *shock breker* dalam kehidupan umat, hanya untuk menanggulangi kebutuhan yang ada, melainkan wakaf yang produktif yang menjadi sumber dana untuk membangun umat, membangun bangsa dan negara. Kalau bisa, negara tidak perlu meminjam ke negara-negara luar (negara-negara donor) seperti IMF (*International Monetary Found*) atau IDB (*International Development Bank*), tetapi dibiayai dengan wakaf yang ada di Indonesia sendiri. Disinilah nilai *masalah mursalah* (*kemaslahatan* umat), yang dapat mengisi hukum perwakafan menurut syariat yang bersifat *ijtihadi*.

2. Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Sumber Daya Ekonomi Umat

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, diantaranya melalui zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. Sebagaimana ketentuan dalam

firman Allah dalam Surat Adzariyah ayat 19 yang artinya “*Dan didalam harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan untuk orang miskin yang tidak mendapat bahagian (yang tidak meminta-minta)*”.³¹ Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu, menganjurkan agar senantiasa memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT. Ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk kepentingan dirinya sendiri, sedang masyarakat di sekitarnya hidup berada dalam kesusahan dan kemelaratan. Islam memberi petunjuk agar manusia selalu berada dalam kebersamaan dan tolong menolong dalam kebaikan selaku makhluk social yang saling kasih mengasihi. Sikap yang dituntut dari seseorang yang memiliki harta benda adalah sikap moderat dan tidak menghambur-hamburkan harta kekayaan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sikap yang baik adalah mendermakan sebagian hartanya untuk kebajikan kaum fakir miskin, sehingga terwujud kemakmuran secara adil. Jika ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi yang dimaksud adalah bagaimana pemanfaatan wakaf tanah milik tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi umat dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan masyarakat. Padadasarnya ibadah wakaf bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan social masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan, yakni

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit.*, hal. 859

memudahkan jalan beribadah kepada Allah. Menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang sakit dan menyediakan sarana untuk belajar dengan baik dan segala keperluan lain untuk kepentingan umum. Wakaf tanah milik produktif lebih menekankan kepada hasil tanah tersebut.

Akan tetapi tetap melestarikan atau menahan harta itu, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf benda tak bergerak memang dijumpai lebih banyak daripada wakaf tanah produktif, seperti peneliti temukan dalam penelitian di wilayah Desa Menemeng. Data yang diperoleh dari sejumlah 6 lokasi namun hanya ada 4 tanah wakaf produktif.

Data mengenai jumlah wakaf tanah hak milik yang ada di Desa Menemeng, menurut jenis penggunaan / pemanfaatannya menunjukkan sudah mulai ada pergeseran mengenai fungsi wakaf. Wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, tetapi sudah merambah untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Misalnya tanah wakaf produktif yang ada di Desa Menemeng, tepatnya di Dusun Montongara. Untuk mengukur kontribusi pelaksanaan wakaf tanah milik yang terjadi di Desa Menemeng adalah dengan melihat pemanfaatan dan penggunaan tanah wakaf tersebut yaitu mengenai jumlah wakaf tanah milik di Desa Menemeng, menurut jenis penggunaan/pemanfaatannya. Pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut, pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan tradisional. Namun demikian, kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dapat dirasakan walaupun belum maksimal, terutama wakaf tanah milik yang berfungsi sosial, misalnya untuk sarana dan prasarana pendidikan, dan pondok pesantren. Sedangkan wakaf tanah milik yang mempunyai kontribusi langsung terhadap ekonomi umat dapat dikatakan masih kurang walaupun jika menilik pemanfaatan tanah milik yang ada pada saat ini sudah ada 4 bidang

yang diklasifikasikan sebagai wakaf tanah produktif yang kesemuanya terletak di Dusun Montong Are, Dasan Gundul, Jabon, Jabon Darek dan Dusun Gundul.

Hasil penelitian di lapangan (wawancara dengan Bapak Supiandi, alamat Dusun Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah : Jabatan Skretaris Desa Menemeng menemukan data, bahwa dari tanah wakaf yang diklasifikasikan sebagai tanah wakaf produktif di Dusun Motong Are, Dasna Gundul, Jabon, Jabon Darek dan Dusun Gundul sebanyak 6 bidang tersebar di seluruh wilayah Desa Menemeng dengan luas 21.865 M2 (3,5 petak). Sementara dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, ditanami 2 kali Padi tiap 1 tahun 1 kali tanam palawija. Penggunaan hasil dari wakaf tanah produktif tersebut dimanfaatkan untuk 1) Pengelolaan anak yatim dan lanjut usia (jompo), 2) Pengelolaan Masjid masing Dusun tempat tanah wakaf tersebut..
085337468481

Dari hasil panen sawah wakaf tanah milik produktif setiap tahun diperuntukkan bagi pengelolaan anak yatim hal tersebut secara lengkap terungkap melalui wawancara dengan Bapak Ayan Arianto Ketua LPMD Desa Menemeng sebagai berikut¹¹⁶ : “Wakaf tanah milik yang dikelola oleh Masing Pengurus Masjid perdusun yang hasilnya diperuntukkan asuh yatim (tidak dirumahkan) yaitu sebanyak 128 anak dan lanjut usia (jompo) sebanyak 91 orang, setiap bulan memberikan santunan untuk anak Taman kanak- kanak mendapat beras 5 liter, anak Sekolah Dasar mendapat 5 liter beras dan uang sebesar Rp. 15.000,-, anak SMP mendapat 5 liter beras dan uang sebesar Rp. 20.000,- sedangkan anak SMA mendapat 5 liter beras dan uang sebesar Rp.35.000,-, rata-rata pengurus Masjid Masing-masing Dusun tempat tanah wakaf tersebut mampu menyalurkan 2,5 Kwintal Beras, sedangkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan, yang

mana uang yang dibagikan tersebut berasal dari donatur tetap yang memberikan sumbangan uang yang masing-masing donatur berkisar Rp.1000,- sampai dengan Rp.50.000,- setiap orang. Beras yang dibagikan kepada para yatim serta lansia (jompo) dari hasil panen tanah hak milik produktif yang di kelolah oleh Pengurus Masjid juga membagikan beras hasil panen dari wakaf tanah milik tersebut secara insidentil kepada masyarakat sekitar Desa Menemeng yang membutuhkan bantuan.

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian sebagaimana tersebut dalam pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah *ijtihad*, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan *shodaqah*, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam.
2. Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal ;
3. Perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan di Desa Menemeng, adapun yang merupakan faktor-faktor penghambat adalah:

- a. Struktur hukum;1. Kepala Kantor Urusan Agama belum menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, pengawas, pelaksana perwakafan secara maksimal,khususnya di bidang pembimbingan.
2. Belum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia ditinhkat Kabupaten.
- b. Budaya hukum umat Islam di Menemeng masih berorientasi pada pola pikir konvensional. Wakaf dipahami sebagaimana yang ada dalam pengetahuan agama secara klasik .Disamping kurang maksimalnya sosialisasi undang-undang perwakafan kepada masyarakat ditingkat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jilid 6, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Pilar Media, Yogyakarta.

Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubahan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ahmad Daud Ali, 1988, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Press, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, al Maarif*, Bandung.

Asyaukani, 129, *Dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, 2006

Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983.

Depag RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Al Waah, Semarang
-----, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirt. Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, Jakarta

Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo, *Jumlah Tanah wakaf Petak/Bidang, Luas dan Jenis Penggunaannya Kabupaten Sukoharjo bulan Januari 2009*

Didin Hafiduddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Cet. I, Jakarta, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, Gema Insani, Cet. I, Jakarta

Esmi Warrasih, 2005, *Pranatana Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

Farida Prihatin, dkk, 2005, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salman, Barlintih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1981, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Cet. IV, Jakarta
Informasi Peraturan Perundang-undangan, 2007, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
Kompilasi Hukum Islam, *Reader*, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah

Agung RI Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

M. Thaher Azhary, 1992, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*,
Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 2003, Penerjemah: Syifullah Ma'shum, Slamet Basyir,
Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin,
Jakarta, Pustaka Firdaus.

Muhammad Qawwas Qal'ahji, 1999, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khaththab, ra*,
terjemahan M. Abdul Mujieb, AS, dkk, cet.I, Raja Grafindo, Jakarta

Muhammad Al Khatib, *Al Iqna*, Daarul Maarfi, Beirut
Undang-undang Perwakafan, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Departemen Agama, Jakarta

Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf di Dunia Islam*,
Mimbar Hukum dan Peradilan
Nomor 69 April 2009

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia tahun 2003, Proyek
Pengelolaan Zakat

dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan
Haji, Jakarta.

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2006,
Direktorat Jenderal Bimbingan
Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2008, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf,

Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta.
Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2006, Direktorat Pemberdayaan
Wakaf Direktorat
Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

Peraturan Pemerintah Perwakafan, 2001, Dirjen Bimas Islam,
Depag, Jakarta
Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf,
2006,

Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama, Jakarta.

Rahmat Djatnika, 1992, *Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya*
Aspek-aspek
Fundamental, Mimbar Hukum, al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan
Badan
Peradilan Agama Islam, Jakarta., 1983, *Pandangan Islam tentang Infaq,*
Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan, Al
Ikhlas, Surabaya

Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru,
Bandung
Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Sukoharjo, 2009,
BAPEDDA
Kabupaten Sukoharjo.

Sadzali Musthafa, 1989, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam*
di Indonesia, Cet. I, CV.Ramadhani, Solo

Setiono, 2005, *Penelitian Hukum, Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial*, Surakarta, UNSPress.

Strategi Pengamanan Tanah wakaf, 2004, Proyek Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Garahaji *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2006, DirektoratPemberdayaan Wakaf,

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta. Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. I, Al Ikhlas, Surabaya